



Analisa Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kecamatan Tarogong Kaler

Irma Rosmayati

Universitas Garut

Alamat: Jl. Raya Samarang No. 52.A Tarogong Garut

Korespondensi penulis: penulis.pertama@email.com

Abstrak. *This research to find out about the procedures and steps in implementing financial management systems and procedures in government institutions, in this case the Tarogong Kaler District office, Garut Regency. As a government institution, of course it is required to create financial management that is accountable, transparent and of course effective and efficient, so that it can account for everything to the relevant parties and society in general. In this research the author used a descriptive qualitative research method by paying attention to the results of interviews and reviewing related data obtained from several accurate resources.*

Keywords: *finance, management, procedures*

Abstrak. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tentang prosedur serta langkah-langkah dalam penerapan sistem serta prosedur pengelolaan keuangan pada lembaga pemerintah dalam hal ini adalah kantor Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Sebagai sebuah institusi pemerintahan tentunya setiap lembaga diharuskan membuat suatu sistem pengelolaan keuangan yang berasaskan akuntabilitas, transparan dan tentunya efektif efisien, sehingga bisa mempertanggungjawabkan setiap penggunaan keuangan kepada pihak-pihak terkait maupun masyarakat secara umum. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan memperhatikan hasil wawancara serta penelaahan terhadap data-data terkait yang diperoleh dari beberapa sumber data akurat.

Kata Kunci: *keuangan, pengelolaan, prosedur*

PENDAHULUAN

Kecamatan yaitu instansi pelayanan publik, tercantum pada Peraturan Pemerintah No 17 / 2018 seperti halnya Kantor Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. (Purnawan, Ramdhani, Fahmi, Nurbudiwati, 2022) dengan sarana kantor Camat dimana terdapat pelayanan pada masyarakat terdiri dari pimpinan (Camat) dan perangkat lainnya. Pelayanan dan pengelolaan lembaga pemerintah harus dengan pengawasannya untuk mewujudkan good governance (Walangitan, Morasa, Mawikere, 2020).

Posisi Geografis Kecamatan Tarogong Kaler dengan luas wilayah sekitar 38,52 Km dengan data meliputi :

Tabel 1. Batas Wilayah Tarogong Kaler

Batas	Kecamatan
Utara	Leles dan Banyuresmi
Timur	Banyuresmi
Selatan	Tarogong Kidul
Barat	Samarang

Kecamatan Tarogong Kaler memiliki 12 desa dan satu kelurahan sebagian besar desa-desanya terletak didaerah dataran. Mayoritas bidang usaha penduduk wilayah tersebut berdagang, UMKM, peternakan domba dan ikan serta di bidang jasa wisata. Adapun selain itu bervariasi

sebagai pegawai negeri sipil dan jasa lainnya (Hasil wawancara dengan staf Kecamatan Tarogong Kaler, 2022).

Berkaitan dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan pada peraturan bupati Garut No 112/ 2021 tentang rencana kerja Kecamatan Tahun 2022 (RKPD) dalam periode satu tahun. Selanjutnya disebut Renja atau disingkat RKA berisi perencanaan, penganggaran, pendapatan, program dan kegiatan. Serangkaian sistem dan prosedur pengelolaan tersebut tentu membutuhkan keahlian dan keterampilan terlebih melingkupi wilayah Desa dan kelurahan.

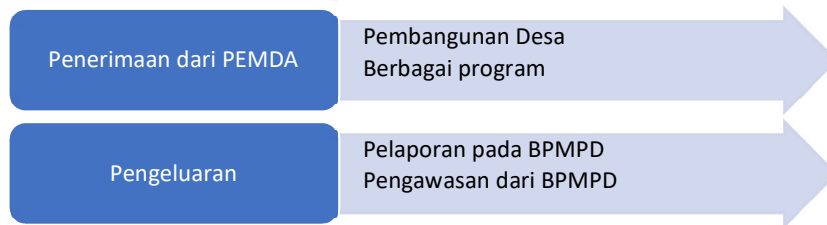
Pembangunan dimulai dari bawah (bottom up) dan mengaitkan masyarakat secara langsung selanjutnya pada tingkat kecamatan dan kabupaten sesuai dalam UU No/23 Tahun 2014 mengenai otonomi diharapkan memahami aspirasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Dalam pembentukan perencanaan pembangunan yang tidak sinergi dengan masyarakat mengakibatkan birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam proses pembangunan (Kania, Ulumudin, Geusan Akbar, 2020)

Berdasarkan wawancara awal diperoleh gambaran beberapa masalah dalam kaitan dengan sistem dan prosedur tata kelola keuangan di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut diantaranya Pertama, keterbatasan regulasi seperti keterlambatan dan kesulitan kecamatan dalam pembentukan perancangan kegiatan dan keuangan desa. Kedua, kurangnya anggaran untuk membiayai penyusunan Desain dan RAB. Ketiga, SDM dan personel yang kurang. Ketiga, pemantauan triwulanan tidak efisien dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa masih terbatas.

Sistem adalah jaringan prosedur yang berkaitan dalam aktivitas untuk tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005). Berangkat dari wawancara awal, pada sistem pengelolaan keuangan kecamatan tarogong kaler dalam aspek pencapaian tujuan masih terdapat beberapa kendala imbas dari kondisi pandemi Covid- 19 dan pasca pandemi sehingga beberapa tujuan sistem belum terealisasi secara optimal.

Adapun prosedur adalah urutan pekerjaan yang dilaksanakan aktivitas sesuai intruksi (Cole, 2018). Pada aspek ini masih terdapat kendala terkait dengan koordinasi (keseragaman dalam tindakan) yang disebabkan oleh pola komunikasi daring sebelumnya serta adaptasi luring yang memerlukan penyesuaian agenda dan waktu dari aktivitas implementasi berbagai program.

Pengawasan dan evaluasi pada kecamatan Tarogong Kaler dilaksanakan oleh BPMPD berkontribusi pada Bupati dalam kebijakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah pada Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bappeda, 2017) dimana sistem dan prosedur pengelolaan keuangan pada kecamatan terdapat pertanggung jawaban kepada lembaga pemerintah ini. Secara sederhana seperti gambar di bawah ini :



Gambar 1. sistem dan prosedur pengelolaan keuangan pada kecamatan
Selanjutnya masuk ke dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dalam gambar di bawah ini :



Gambar 2. Struktur Penyusunan APBD TA. 2022

KAJIAN TEORI

1. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi berkaitan dengan akuntansi dan keuangan berdasarkan data base akuntansi untuk manajemen atau pemangku kepentingan eksternal. (Muda, 2017).

Hall (2011) sistem informasi akuntansi yakni satu bagian untuk mengakumulasi, mengatur, mengolah, mengkaji, dan menginformasikan keuangan dan keputusan untuk ekstern dan intern.

Setiawati dan Diana (2014) sistem informasi akuntansi ialah sistem dengan tujuan menghimpunkan, memproses dan melaporkan informasi untuk negoisasi keuangan.

Maka sistem informasi akuntansi merupakan data informasi akuntansi perusahaan

2. Sistem

Romney et all (2015) menjelaskan bahwa sistem ialah bagian yang berhubungan demi mencapai sebuah sasaran (Jogiyanto, 2011). Sistem adalah satu jaringan kerja pada langkah-langkah yang berhubungan, bergabung untuk melaksanakan tujuan tertentu (Hutahacan 2015).

Oleh karena itu, sistem merupakan komponen yang disambungkan bersama dalam memudahkan arus interpreta siserta dokumentasi untuk mencapai suatu tujuan.

3. Dimensi Sistem

Romney dan Steinbart (2015) menjelaskan dimensi sistem meliputi :

- a) a. Bagian yang sama-sama berkaitan/ subsistem yaitu subsistem dengan simbol dari sistem yang memangku tugas serta berpengaruh pada pencapaian totalitas.
- b) b. Interaksi terjadi antara lain dengan kontak sosial dan komunikasi
- c) c. Tujuan dalam sistem ini ialah menyediakan suatu informasi yang dipergunakan dalam perancangan, penanganan, penilaian serta perbaikan berkepanjangan.

4. Fungsi Sistem

Yuliastrie (2013) mengemukakan beberapa tujuan sistem, yaitu:

- a. Integrasi Sistem

Mempertautkan individu/kelompok, bersama-sama mengolektifkan data dan penerusan secara spontan serta, meningkatnya penyalarsan dan perolehan sinergi.

- b. Efisiensi Pengolahan
Pemanfaatan basis data dalam upaya kesesuaian administrasi data lalu dalam penataan data berkaitan dengan individualitas Informasi serta pengakplikasian dan pembawaan informasi.
- c. Dukungan Keputusan Untuk Manajemen
Pertama memenuhi informasi guna kepentingan proses pembawaan kebutuhan dan juga pemerolehan Informasi eksternal lewat jaringan komunikasi.

5. Karakteristik Sistem

Menurut Jogiyanto (2011) meliputi, sebagai berikut:

- a. Komponen Sistem
Komponen sistem yang memiliki karakteristik tertentu dan merambat keseluruhan sistem.
- b. Batasan Sistem
Suatu ruang lingkup sistem.
- c. Lingkungan Luar Sistem
Hal ini mewakili segala hal eksternal dalam sistem.
- d. media perantara antara satu subsistem baik input maupun output.
- e. Masukan Sistem
Energi sistem, baik fisik maupun immaterial, sebagai stimulus positif.

6. Prosedur

Prosedur ialah bagian sistem yang melambangkan deretan kegiatan ditetapkan untuk menanggung aktivitas usaha dan perundingan secara iteratif yang dilakukan dengan sama (Ardiyos, 2004).

Menurut Koontz Nuraida (2014) mengatakan prosedur merupakan pecahan dari konsep kantor. Dari macam-macam jenis rencana yaitu misi, tujuan, rencana, kebijakan peraturan, program, dan juga anggaran.

Sedangkan prosedur adalah urutan yang disusun dalam pekerjaan keseluruhan dari beberapa orang yang sepadan terhadap penyelesaian transaksi perusahaan yang berulang-ulang.

Selanjutnya disimpulkan bahwa prosedur adalah serangkaian kegiatan administrasi, seringkali mengaitkan divisi, dirancang untuk memastikan kesamaan pemrosesan transaksi usaha yang terjadi.

7. Dimensi Prosedur

Menurut Ardiyos (2004), dimensi sistem dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tindakan
Tindakan merupakan langkah atau pekerjaan yang dilakukan untuk menjalankan prosedur yang telah ada.
- b. Penetapan Pekerjaan
Prosedur yang telah ditentukan atau dengan kata lain setiap bagian pekerjaan memiliki tugas yang berbeda.

c. Keseragaman

Prosedur yang dijalankan harus sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, artinya setiap komponen harus menjalankan prosedurnya dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

8. Fungsi Prosedur

Prosedur yang mungkin bermanfaat meliputi:

- a. Untuk memudahkan langkah mencapai tujuan
- b. Menyederhanakan pekerjaan

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif (Kuncoro, 2014) melalui data kualitatif yang diperoleh dari objek penelitian bentuk lisan dan tulisan, diantaranya transparansi, akuntabilitas, sistem dan prosedur pada bagian keuangan Kecamatan Tarogong Kaler.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hal pertama deskripsi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut yang dijadikan objek penelitian. Selanjutnya diuraikan karakteristik responden yang terlibat dalam penelitian ini serta pembahasan secara deskripsi tentang variabel-variabel penelitian.

Sesuai Peraturan Bupati Garut No 27/ 2016, Peraturan Bupati Garut No 111 / , Peraturan Bupati Garut No 254 / 2015 dan Peraturan Bupati Garut No 102 Tahun 2014. Pemerintah Kecamatan Tarogong Kaler berupaya dalam profesionalisme tugas nya dan berbagai kebijakan dalam menunjang pelaksanaan tugas Camat dan Kepala Desa untuk pelayanan kepada masyarakat yang melibatkan masyarakat. Adapun karakteristik pegawai kecamatan Tarogong Kaler berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

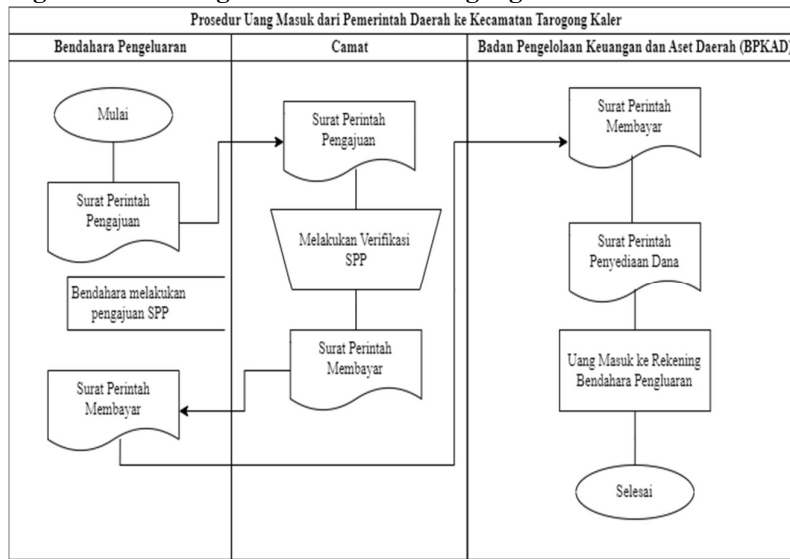
No.	Jenjang	PNS	TKK	TKS	Jumlah
1	S-2	4	-	-	3
2.	S-1	7	4		11
3.	Diploma	-	-	-	-
4.	SLTA	8	9	5	22
5.	SLTP	1	-	-	1
6.	SD	-	-	-	-
Jumlah		21	13	5	39

Untuk pengelolaan anggaran bahwa anggaran dari pemerintah daerah terserap 100 persen guna pembangunan dan kesejahteraan desa namun pada realisasi dan operasional di lapangan tergantung pada kondisi dan kebijakan yang ditempuh paling efektif seperti pada saat pandemic Covid-19, anggaran yang diperuntukkan perbaikan jalan kemudian dialokasikan pada upaya pencegahan dan penanganan pandemi tersebut. Seluruh kebijakan di dalam alokasi keuangan merujuk pada perintah pemerintah setempat, kebijakan camat dan seluruh kasi dalam tataran wilayah kecamatan tersebut (wawancara dengan Kasi keuangan Kecamatan tarogong kaler, 2022). Terlihat bahwa capaian tujuan belum sepenuhnya optimal dilihat dari pendapatan setara UMR (UMR Garut sebesar Rp. Rp 1.975.220 namun masih lebih rendah dibandingkan kota lain seperti Tasikmalaya sebesar Rp. Rp 2.326.772) (<https://dinaspajak.com>) UMR > UMP Jawa

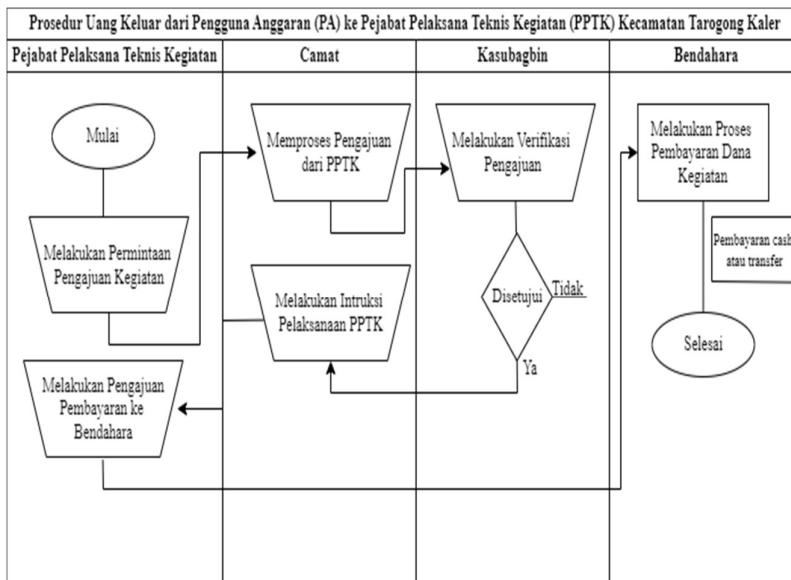
Barat) begitu pula tingkat pendidikan dan kesehatan terlebih pada kasus stunting yang masih besar.

Kesejahteraan Sosial adalah kemampuan material, spiritual, dan sosial dan hidup layak (UU No 11 / 2009) sedangkan pembangunan adalah perubahan pola masyarakat dan nilai – nilai kemanusiaan terhadap kondisi lingkungan serta tujuan politiknya (Afifuddin, 2012). Pembangunan manusia berada pada posisi yang sebenarnya, maka akan berdampak pada kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan manusia menggunakan indikator IPM (Human Development Index) sedangkan kesejahteraan masyarakat menggunakan indikator pendapatan per kapita dan kemiskinan (Charley M. Bisai et all, 2019).

Prosedur Pengelolaan Keuangan Kecamatan Tarogong Kaler



Gambar 2. Prosedur Uang Masuk



Gambar 3. Prosedur Uang Keluar

Sumber : Bagian Keuangan Kantor Kecamatan Tarogong Kaler, 2022.

Keterangan :

- a) Uang masuk dari pengajuan spp dari bendahara dan spm dikeluarkan oleh pa / pengguna anggaran atau camat (surat perintah pengajuan dan surat perintah membayar) diajukan ke BPKAD melalui bagian perbendaharaan di proses hingga keluar SP2D atau surat perintah penyediaan dana setelah dapat SP2D uangmasuk rekening bendahara pengeluaran kecamatan.
- b) Uang keluar menunggu permintaan dari PPTK pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang diajukan ke Pengguna Anggaran (PA) atau camat kemugian ke kasubag untuk verifikasi. Selanjutnya ke PA dilanjutkan intruksi ke PPTK untuk dilaksanakan. Terakhir PPTK mengajukan ke bendahara untuk di bayar atas kegiatan tersebut dimana pembayaran dalam bentuk cash atau transfer.

Capaian Kinerja

Untuk realisasi anggaran dari PEMDA, alokasi dari kecamatan kepada pos-pos pengeluaran tercapai 100 persen namun demikian dalam alokasi dan implementasi di lapangan sifatnya situasional seperti pada saat pandemic Covid-19 dimana anggaran yang masuk diperuntukkan untuk perbaikan jalan namun karena masalah krusial adalah pencegahan dan penanganan pandemic maka alokasi diarahkan kepada kegiatan tersebut. Begitu pula dalam prosedur sudah sesuai ketentuan namun pelaksanaan anggaran bersifat fleksibel dan situasional.

Penetapan Pekerjaan

Dalam hal penetapan pekerjaan berdasarkan Peraturan Bupati No 64/ 2016 yang meliputi tugas Kecamatan yang dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan (Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013) terdiri dari rekomendasi, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan.

Keseragaman

Pada wawancara penulis bagian keuangan Kecamatan Tarogong Kaler diperoleh penjelasan meliputi :

- a) Koordinasi secara informal melalui diskusi tentang aset dan alokasinya mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dan sudah sudah dilaksanakan;
- b) Evaluasi saldo kas yang ada;
- c) Masalah krusial pelaporan tiap bulan dari PPTK atau kasi.

Pelaksanaan

Pada Bagian Keuangan terdapat satu orang bendahara pengeluaran (pengelolaan keuangan) dan satu orang pengurus barang (aset) dimana perencanaan berasal dari Kasubag umum perencanaan sehingga kondisi ini memerlukan tambahan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada bagian keuangan serta perlunya regenerasi untuk penguasaan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

Evaluasi

Pada Bagian Keuangan bertugas sebagai penyedia data sedangkan pengawasan dan pengendalian oleh Sekmat dan Camat. Selanjutnya informasi tentang keuangan oleh kasubag keuangan kepada pimpinan yang seterusnya adalah aktivitas kasubag umum untuk evaluasi dan pelaporan. Aktivitas rapat internal di keuangan minimal satu bulan sekali dan maksimal setiap ada kegiatan.

KESIMPULAN

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kecamatan Tarogong Kaler secara umum bisa digambarkan sebagai berikut:

- a. Untuk sistem organisasi Kecamatan Tarogong Kaler sejalan dengan Peraturan Bupati Garut No 27 /2016, Peraturan Bupati Garut No 111/ 2020 dan Peraturan Bupati Garut No 254 / 2015. Adapun komponen yang terdapat pada sistem sudah cukup mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugas hanya saja masih terdapat kekurangan SDM sehingga terkadang adanya penumpukan pekerjaan yang memperlambat implementasi tugas.
- b. Dalam hal prosedur pekerjaan sudah baik sesuai dengan tupoksi beserta koordinasi dan evaluasi yang rutin dilaksanakan baik secara formal maupun informal.
- c. Untuk realisasi anggaran dari PEMDA, alokasi dari kecamatan kepada pos-pos pengeluaran tercapai 100 persen namun demikian dalam alokasi dan implementasi di lapangan sifatnya situasional seperti pada saat pandemic Covid-19 dimana anggaran yang masuk diperuntukkan untuk perbaikan jalan namun karena masalah krusial adalah pencegahan dan penanganan pandemic maka alokasi diarahkan kepada kegiatan tersebut. Begitu pula dalam prosedur sudah sesuai ketentuan namun pelaksanaan anggaran bersifat fleksibel dan situasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, E. Kuncoro dan Riduwan. 2014. Cara Menggunakan dan Memakai. Path Analysis (Analisis Jalur). Cetakan ke-6. Bandung: Alfabeta.
- A Hall, James. 2011. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati, 2011, Sistem Informasi Akuntansi Perancangan Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Ardiyos. 2004. Kamus Besar Akuntansi. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Basu Swastha. 2003. Manajemen Penjualan. Yogyakarta: BPFE.
- B. Romney, S. & Steinbart, P. J., 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta selatan: Salemba Empat.
- Diklat dan Bimtek Sosialisasi Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2022. <https://info.diklat.org/2021>
- Ikeu Kania, Aceng Ulumudin, Gugun Geusan Akbar, 2020. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN GARUT. Jurnal Ilmu Administrasi Volume 11, Nomor 1
- J. Hutahaean, Konsep Sistem Informasi, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Jogiyanto H.M, 2011. Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi. Penerbit : Andi Yogyakarta
- Jauhar, S. R. (2015). Pengantar Manajemen. Jakarta: Prestasi Pustakakarya.
- Soemantri, B. T. (2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Bandung: Fokus Media
- Kuncoro, M. (2014). Metode riset untuk bisnis dan ekonomi bagaimana meneliti dan menulis, Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.

- Muda, Iskandar dkk. 2017. Sistem Informasi Akuntansi. Medan: Penerbit. Madenatera
- Nivi Chintia Walangitan, Jenny Morasa, Lidia M. Mawikere, 2020. TATA KELOLA DAN KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR KECAMATAN. WANEA KOTA MANADO. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 15(2), 2020, 219-22
- Nuraida, Ida. 2014. Manajemen Administrasi Perkantoran Edisi Revisi. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Purnawan, Abdullah Ramdhani, Fahmi, Nurbudiwati, 2022. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DIKECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 9 Nomor 1
- Wijaya, Tony. (2018), Manajemen Kualitas Jasa, Edisi Kedua, Jakarta: PT.Indeks
- Yuliastrie, Nenden Dewi, Junaidi, Khana Tiara. 2013. Sistem Pakar Monitoring Inventory Control Untuk Menghitung Harga Jual Efektif Dalam Meningkatkan Keuntungan. Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan.
- (<http://bappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/RENSTRA-2.pdf>.)